

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi, Wiratni. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Binsarjono, Tugiman dan Ikhwan Sopa. *Grey Area Perpajakan Mitos atau Fakta*. Jakarta: PT. Gemilang Gagasindo Handal, 2008.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Gunadi. *Panduan Komprehensif Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT. Multi Utama Consultindo, 2011.
- Komariah, Rukiah dan Ali Purwito. *Pengadilan Pajak: Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean dan Cukai*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Prastowo, Yustinus. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Prastowo, Yustinus, Agus Priyatna dan Yosep E. Nugraha. *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha dan Peristiwa Khusus*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Setiawan, Agus dan Basri Musri. *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soemitro, Rochmat. *Pajak Pertambahan Nilai*. Bandung: PT. Eresco, 1990.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin. *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang: Empat Dua Media, 2012.
- Sukardji, Untung. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Susetio, Wasis. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2013.

Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2012.

Tjahjono, Achmad dan Triyono Wahyudi. *Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal Jawab dan Kasus*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Wahono, Sugeng. *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak itu Mudah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.

Wikanjati, Argo dan Tim Saujana Media. *Kamus Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2012.

Yani, Ahmad. *Seri Praktis Perpajakan: Solusi Masalah Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kencana, 2006.

B. Peraturan perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, UU No. 42 Tahun 2009, LN No. 150 Tahun 2009, TLN No. 5069.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. PP No. 1 Tahun 2012, LN No. 5271.

Indonesia, *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah Diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000*. PP No. 24 Tahun 2002, LN No. 49 Tahun 2002, TLN No. 4199.

Direktorat Jenderal Pajak. *Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)*. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.53/2003

Direktorat Jenderal Pajak. *Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)*. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010

Direktorat Jenderal Pajak, *Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006